

ABSTRAK

Implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah, dewasa ini telah mendorong beberapa perubahan antara lain adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini seharusnya semakin mendorong peluang untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih mudah, responsif, berkualitas dan tentunya lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal. Tujuan dari penelitian ini antara lain (1) Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pemberian Izin mendirikan bangunan, (2) Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi Camat/ Lurah/ Kepala Desa apabila menerima pelimpahan kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/ Walikota, (3) Mengidentifikasi dan menganalisis jenis prosedur Izin mendirikan bangunan yang dapat dilimpahkan dari Bupati/ Walikota kepada Camat/ Lurah/ Kepala Desa untuk meningkatkan PAD, (4) Menganalisis dan mendeskripsikan model yang sesuai untuk implementasi pelimpahan kewenangan Izin mendirikan bangunan dari Bupati/ Walikota kepada Camat/ Lurah/ Kepala Desa untuk meningkatkan PAD.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada kegiatan adalah kualitatif., dimana pada penelitian kualitatif menampilkan data deskriptif mengenai gambaran dari hasil penelitian sesuai dengan fokus masalah penelitian dan dapat didukung dengan adanya data kuantitatif. Lokasi penelitian meliputi 4 wilayah yaitu sebagai berikut (1) Kabupaten Malang, (2) Kabupaten Probolinggo, (3) Kabupaten Jombang, (4) Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel di mana elemen populasi dipilih secara sengaja dengan didasarkan pada kekuatan yang telah ditentukan oleh peneliti. Analisis data menggunakan triangulasi yang bersumber dari kondisi eksisting di lapangan, hasil wawancara dengan responden kunci, dan data sekunder pendukung.

Dari hasil survey yang dilakukan di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Madiun, permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan kurang lebih sama, yakni (1) faktor peraturan perundang-undangan, (2) faktor aparat, dan faktor sarana serta prasarana. Hasil penelitian di empat Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa kekuatan aparatur birokrasi pemerintahan dalam hal ini camat untuk melaksanakan perannya di dalam pelaksanaan kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati/ Walikota, tidaklah serta merta dilaksanakan sesuai kehendak Bupati/Walikota, akan tetapi melalui berbagai mekanisme, yang tertuang di dalam aturan main (regulasi). Regulasi, camat dan ketersediaan dukungan SDM, sarana/prasarana dan anggaran adalah elemen penting, serta penentu dalam sebuah implementasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa, camat dikelilingi dan diikat oleh aturan, kewenangan, tanggung jawab dan ketersediaan dukungan SDM, sarana/prasarana dan anggaran, yang hubungannya dalam

implementasi sangat sistematis, dalam menjalankan perannya sebagai penerima delegasi dari Bupati/ Walikota.

Kesimpulan yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan penelitian antara lain (1) Regulasi, (2) Ketersediaan dukungan SDM, (3) Sarana/prasarana, dan (4) Anggaran.

Kata Kunci : Izin Mendirikan Bangunan, Bupati/ Walikota, Camat/ Lurah/ Kepala Desa, Pelimpahan Kewenangan

ABSTRACT

Implementation of decentralization, today has prompted several changes, among others, is the delegation of governmental authority by the government to the Governor and to the institution or vertically in a particular region. With the delegation of this authority should further encourage opportunities for innovation in providing services to the community easier, responsive, qualified and certainly more oriented to the needs of local communities. The purpose of this study include: (1) Identify and analyze the problems faced by Regency / City Government in awarding Building permit, (2) identify and analyze problems faced Camat / Lurah / Head of Village when receiving a delegation of authority Building permit from the Regent / Mayor, (3) identify and analyze the type of procedure building permit that can be transferred from the Regent / Mayor to Camat / Lurah / village chief to increase revenue, (4) to analyze and describe the appropriate model for the implementation of delegated authority building permit from the Regent / Mayor to Camat / Lurah / village chief to increase revenues.

The approach used in the study is a qualitative activities., Where the qualitative research displaying descriptive data on an overview of the research results in accordance with a focus on research problems and can be supported by the quantitative data. Location study include four regions are as follows (1) Malang, (2) Probolinggo, (3) Jombang, (4) Madiun. This study using purposive sampling is a sampling technique in which elements of the population were purposively selected to be based on the strength of which has been determined by the investigators. Analysis of the data using triangulation sourced from existing conditions in the field, interviews with key informants, and supporting secondary data.

From the results of a survey conducted in four districts, Malang, Probolinggo, Jombang and Madison County, the problems faced in granting permissions founded the building is more or less the same, namely (1) the factors of legislation, (2) factors apparatus, and facilities and infrastructure factors. Results of research in four regency / municipality showed that the power of bureaucratic apparatus of government in this regard camat to carry out its role in the implementation of the policy of delegation of authority Regent / Mayor, it is not necessarily conducted in accordance with the will of the Regent / Mayor, but through a variety of mechanisms, as stipulated in rules (regulations). Regulation, district and support the availability of human resources, facilities / infrastructure and budget is an important element, as well as deciding on an implementation. It shows that, camat surrounded and bound by rules, authority, responsibility and support the availability of human resources, facilities / infrastructure and budgets, the relationship in a very systematic implementation, in their role as delegates from the Regent / Mayor.

The conclusions of a series of research activities include (1) regulation, (2) the availability of human resources support, (3) Facilities / infrastructure, and (4) of the Articles.

*Keywords: Building permit, Regent / Mayor, Camat / Lurah / Head The village,
Delegation of Authority*